



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : V
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Dengan :
1. Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
2. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI;
3. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI; dan
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.
- Hari, Tanggal : Selasa, 09 Juli 2024
Waktu : 13.29 s.d. 15.15 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gd. Nusantara I Lt. 1
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
- Ketua Rapat : Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si.
Acara :
1. Kebijakan dan program percepatan penurunan stunting (termasuk intervensi spesifik dan sensitif);
2. Anggaran percepatan penurunan stunting disetiap Kementerian/Lembaga;
3. Evaluasi program percepatan penurunan stunting di Indonesia hingga saat ini; dan
4. Kampanye perubahan perilaku
- Sekretaris Rapat : Ahmad Rojali, S.Sos/Plh Kabag Set Komisi IX DPR RI
Hadir : A. Anggota DPR RI:
14 dari 28 orang Anggota
dengan rincian:

Pimpinan Komisi IX DPR RI

4 dari 5 Orang Anggota

1. Felly Estelita Runtuwene, S.E. (F-P. NASDEM)
2. Emanuel Melkiades Laka Lena (F-P. GOLKAR)
3. Charles Honoris (F-PDIP)
4. Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si. (F-PKS)

Fraksi-Fraksi

1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)
2 dari 5 Anggota
 1. Itet Tridjajati Sumarijanto, M.B.A.
 2. Dr. H. Edy Wuryanto, S.Kp., M.Kep.
2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-P. GOLKAR)
2 dari 3 Anggota
 1. Hj. Dewi Asmara, S.H., M.H.
 2. M. Yahya Zaini, S.H.
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-P. GERINDRA)
1 dari 3 Anggota
 1. Dr. Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, M.M.
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-P. NASDEM)
1 dari 3 Anggota
 1. Nurhadi, S.Pd.
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)
0 dari 2 Anggota
6. Fraksi Partai Demokrat (F-P. DEMOKRAT)
1 dari 2 Anggota
 1. Hj. Aliyah Mustika Ilham, S.E.
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)
1 dari 2 Anggota
 1. H. Alifuddin, S.E., M.M.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)
1 dari 2 Anggota
 1. Dian Istiqomah, S.Kep
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)
1 dari 1 Anggota
 1. Sy. Anas Thahir

B. Undangan:

1. Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI;
2. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI;
3. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI; dan
4. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

Bapak Ibu, kita akan mulai Rapat Panja kita pada siang hari ini.

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini dihadiri oleh Bapak Pandu Gunadi Atmosukarto, S.T., MUM, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman (SSPIP) beserta jajaran.

Yang terhormat juga dari Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia dihadiri oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia beserta jajaran yaitu Bapak Faisal, SST., M.Si.

Kemudian dari Dirjen Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Phil. H. Kamarudin Amin, MA dari Dirjen, beliau adalah Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, terima kasih, Pak.

Dan juga yang kami hormati, dan juga dari Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia dihadiri oleh Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbudristek RI beserta jajaran, yaitu Ibu Komalasari, M. Pd.

Dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX DPR RI Panja tentang Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia.

Tentu saja mari kita bersyukur kehadiran Allah *Subhana Wata'ala* atas segala limpahan rahmat-Nya dan anugerah-Nya kepada kita semua sehingga kita diberikan kesehatan pada siang hari ini dan marilah kita membuka acara kita dengan membaca doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai.

(RAPAT: BERDOA)

Selesai.

Bapak dan Ibu, rapat hari ini sudah dihadiri oleh anggota Panja Komisi IX DPR RI mengenai pengawasan terhadap penurunan, percepatan penurunan angka stunting dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT: SETUJU)

Kita sepakati sampai 15.00, ya, Bapak dan Ibu, ya. Nanti apabila kurang kita bisa perpanjang kembali. Apakah bisa disetujui rapat kita akan selesai di jam 15.00? Ya.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.29 WIB)

Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus katanya, Pak.

Bapak dan Ibu yang kami hormati, *wabilkhusus* para tamu yang hari ini hadir kami tentu saja mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih *wabilkhusus* kepada Pak Dirjen, *especially*, terima kasih banyak, Pak hadir pada acara Rapat Panja pada siang hari ini di Komisi IX DPR RI.

Rapat kita hari ini adalah membahas tentang kebijakan dan program percepatan penurunan stunting termasuk intervensi spesifik dan sensitif. Jadi, kami berharap nanti yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu fokus langsung kepada kebijakan dan program yang terkait dengan percepatan penurunan stunting.

Dan tentu saja kebijakan program ini disertai dengan anggarannya dan juga evaluasinya sudah sejauh mana, serta bagaimana intervensi ataupun partisipasi dan peran dari masing-masing Lembaga / Kementerian dalam kampanye perubahan perilaku.

Selanjutnya, kami persilakan terlebih dahulu kepada Dirjen, Pak Dirjen dipersilakan. Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Bapak Prof. Dr. Phil. H. Kamarudin Amin, MA, dipersilakan, Pak.

**DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI
(Prof. Dr. Phil. H. KAMARUDIN AMIN, MA):**

Baik. *Bismillahirrahmanirrahim.*
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ibu Ketua Pimpinan dan seluruh anggota Komisi IX yang saya hormati, Bapak Ibu, teman-teman dari Kementerian / Lembaga yang hadir Bersama kita pada hari ini.

Izinkan saya langsung ke program atau intervensi yang kami lakukan di Kementerian Agama. *Next slide.*

Ya, jadi Kementerian Agama melaksanakan atau memberikan intervensi sensitif secara komprehensif dengan cara dengan sasaran remaja pra-nikah calon pengantin keluarga beresiko stunting melalui bimbingan remaja Binwincatin.

Jadi begini, Ibu Pimpinan, di Kementerian Agama itu kami memberikan bimbingan kepada calon pengantin yang jumlahnya setiap tahun itu sekitar 1.000.500 calon pengantin setiap tahun.

Tahun-tahun sebelumnya, memang kami tidak mewajibkan karena terkait dengan anggaran, jadi karena kalau 1.000.500 diberi bimbingan semua tampaknya agak berat dari sisi anggaran, karena mohon izin, anggaran untuk stunting sama sekali tidak ada di Kementerian Agama sebenarnya.

Jadi, anggaran kita itu untuk stunting hanya, ya anggaran biasa rutin kita di Kementerian Agama. Hanya kami menyelipkan bimbingan tentang stunting di Catin itu. Jadi, kita anggaran spesifik untuk stunting sekali lagi tidak ada, sama sekali tidak ada bunyinya, kira-kira begitu. Jadi kami selipkan di BIN-BIN ini.

Nah, kami anggap ini cukup strategis karena stunting itu sebenarnya kan dimulai dari literasi, dimulai dari pengetahuan keluarga-keluarga yang akan mendidik putra-putrinya.

Jadi, mulai tahun ini Bu Ketua Pimpinan, kami mewajibkan seluruh calon pengantin untuk mengikuti Binwin. Jadi, kalau sebelum-sebelumnya cabang kita hanya sekitar sekian ratus ribu, nah mulai tahun ini tetapi di akhir tahun karena masih ada sedikit perbaikan regulasi yang harus kita benahi, begitu.

Jadi, kami sampaikan bahwa dalam Binwincatin itu, itu ada materi khusus untuk stunting yang kami melibatkan mengajak teman-teman dari BKKBN. Jadi ada materinya tentang Binwincatin itu adalah ada materi tentang stunting yang dilaksanakan oleh teman-teman dari BKKBN, kami undang mereka sebagai pemateri.

Yang kedua, tentang kesehatan reproduksi, itu juga dari Kemenkes. Jadi, kami bekerjasama dengan BKKBN dan Kementerian Kesehatan, kemudian ada juga terkait dengan ekonomi keluarga, ada juga tentang keluarga sakinah itu jadi berbagai materi kita selipkan masuk disitu.

Nah, intervensi kita di hulu memang, di hulu atau intervensi sensitif di hulu dengan memberikan materi tentang stunting kepada calon-calon keluarga Indonesia yang jumlahnya cukup besar.

Nah, yang kedua, juga kepada generasi muda yang akan memasuki usia menikah, kami juga memberikan bimbingan. Next slide mungkin, bisa dilihat.

Jadi, jadi pencegahan dan penurunan stunting yang kita lakukan di Kementerian Agama ada *personal assessment*, ada bimbingan remaja pra-nikah, jadi anak-anak SMA kelas 3 atau santri-santri yang sudah kira-kira menjelang memasuki usia perkawinan kita juga berikan bimbingan, kemudian bimbingan perkawinan dan bimbingan keluarga ini yang kita laksanakan di Kementerian Agama.

Kemudian selanjutnya kita kerja sama dengan universitas dan juga ormas, kerja sama dengan ormas-ormas keagamaan, bekerja sama dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi keagamaan. *Next slide.*

Kementerian Agama telah mengeluarkan kebijakan dengan menjadikan bimbingan perkawinan sebagai persyaratan pendaftaran pencatatan perkawinan. Jadi ini salah satu kebijakan yang kita ambil serta melihat angka di lapangan angka stunting di antaranya tidak mengalami penurunan signifikan dari perspektif kami, kami merasa perlu untuk memberikan intervensi kepada seluruh calon pengantin yang sebelumnya sangat terbatas.

Maka, mulai tahun ini kita akan mewajibkan bahwa seluruh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang di dalamnya mereka akan menerima materi tentang stunting, tentang kesehatan reproduksi dan lain-lain. *Next slide, ya lanjut.*

Nah, ini Bu Pimpinan, Bu Ketua, jadi tahun ini kita hanya bisa melaksanakan atau menyelenggarakan 697.000 calon pengantin yang terbimbing ada 74.000 remaja yang terbimbing, kemudian ada 17.000 keluarga yang terbimbing, sementara peristiwa nikah itu sendiri tahun 2023 itu 1.000.500. Jadi, masih jauh dari angka ideal ya, masih sekitar 40% mungkin.

Sehingga, mulai sekali lagi, semester kedua tahun ini sampai tahun depan dan *Insyah Allah* seterusnya akan kita wajibkan supaya bisa memberikan pengetahuan memadai kepada calon-calon pengantin karena kuncinya di mereka, saya kira.

Begitu juga kita memberikan konsultasi keluarga di kantor-kantor urusan agama di seluruh Indonesia, kita punya kantor berbasis Kecamatan kita punya kantor sekitar hampir 6.000 Kantor KUA di seluruh Indonesia yang bersedia untuk memberikan konsultasi keluarga kepada keluarga-keluarga Indonesia, baik keluarga muda maupun keluarga yang sudah lama bisa datang ke kantor urusan agama memberikan penyuluhan dan bimbingan keagamaan termasuk konsultasi terkait dengan stunting. *Next.*

Penguatan literasi, karena sekali lagi kami tidak punya anggaran dan memang kami tidak memiliki kapasitas dan juga kewenangan untuk memberikan intervensi langsung, karena itu ada di BKKBN dan di Kemenkes, kami hanya terbatas pada peningkatan literasi saja.

Nah, penguatan literasi juga kita melibatkan *influencer* melibatkan tokoh-tokoh masyarakat agar perkawinan dini karena ada korelasi ternyata hasil penelitian kita, ada korelasi yang cukup signifikan antara pernikahan dini dengan angka stunting. Jadi, pernikahan dini ini juga adalah hal yang harus kita cegah, kemudian apa namanya literasi tentang eh keluarga ini ternyata sangat penting bagi keluarga-keluarga kita untuk menghindari lahirnya generasi yang tidak berkualitas di antaranya adalah stunting. *Next slide.*

Ya, misalnya kita kerja sama dengan UIN Walisongo mereka punya KKN tematik, Cegah Kawin Anak untuk Cegah Stunting, jadi KKN mereka itu temanya ini Cegah Kawin Anak untuk Cegah Stunting.

Kemudian kita kerja sama juga dengan Gerakan Keluarga Maslahat Nahdatul Ulama. *Alhamdulillah* tahun lalu kita mencapai 1 juta lebih peserta untuk diberikan bimbingan tentang keluarga maslahat di dalamnya juga terkait dengan stunting. *Next*.

Nah, ini anggaran, sekali lagi ibu ketua saya sampaikan bahwa anggaran ini adalah murni anggaran rutin biasa yang tidak sama sekali ada anggaran stunting masuk di sini. Jadi, seandainya memungkinkan ya, tapi tentu kita memahami dinamika dan regulasi yang ada.

Mungkin akan lebih efektif jika sedikit di, di-*endorse* untuk meningkatkan kualitas bimbingan karena sekali lagi angka ini masih sangat kecil angka ini bimbingan keluarga kami memang punya tantangan cukup besar, Bu misalnya ketika kami mewajibkan untuk seluruh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan kami terkendala di anggaran, anggaran itu sangat kecil sekali.

Tetapi, kami tidak boleh berhenti di situ karena kebutuhan akan bimbingan itu sangat tinggi dan kami meyakini itu sangat berkorelasi dengan keluarga berkualitas sehingga kami mencoba untuk mencari metode yang mungkin kualitasnya tidak sama, ya. Jadi, metodenya misalnya *hybrid*, jadi kalau selama ini *face to face* langsung kita memberikan bimbingan nanti mungkin sebagian bisa *hybrid*, bisa juga dilaksanakan secara masif di kantor-kantor urusan agama.

Jadi, hanya ada Rp 95 Miliar untuk penanganan, tapi ini bukan stunting sekali lagi. Stunting hanya bagian yang ada di anggaran rutin dan kegiatan rutin kami di bimbingan perkawinan, bimbingan keluarga dan juga bimbingan remaja. *Next*.

Ya, terima kasih, Bu Ketua itu yang dapat kami sampaikan di Kementerian Agama, mudah-mudahan memberikan informasi yang memadai untuk Ibu dan anggota Komisi VIII, eh IX, *sorry*, maaf.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih banyak Pak Dirjen. Jadi, tidak ada anggaran spesifik dari tim percepatan penurunan stunting, memang anggaran dari kementerianya aja langsung ya. Ya, oke pak, *noted*.

Baik kita bergeser, silakan kepada, saya minta persetujuan dulu nih dari Bapak Ibu Anggota Komisi Panja ya, Komisi IX. Jadi, yang kita undang

Sebenarnya Pak Dir, Bapak Ibu Dirjen. Namun, hari ini Kementerian Kemendikbud-DIKTI juga sedang rapat dengan Komisi X.

Tadi juga juga sudah diinformasikan kepada kami di Pimpinan. Jadi karena memang mitranya Komisi X, jadi rapat di sana tapi mengutus salah satu direktur yang memang memahami terkait isu stunting ini.

Kemudian, untuk Kemensos ini sebenarnya sudah berapa kali diundang ya. Harusnya yang hadir Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, hari ini diwakili oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang dikarenakan ini juga sudah informasi sebelumnya kepada pimpinan bahwa Pak, Pak Dirjen atau Bu Dirjen nih Bapak atau Ibu, nih Pak yang Dirjennya dari Kemensos? Bapak. Oh ya, Pak Dirjennya sedang di luar ya sedang tugas di luar negeri.

Begitu juga untuk Kementerian PUPR ya, Kementerian PUPR harusnya yang hadir adalah Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hari ini diwakili oleh Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman SSPEP, SSPIP.

Ini juga sama sudah disampaikan kepada kami di pimpinan karena Pak Dirjen, Pak Dirjen ya, Pak? Bu Dirjen. Bu Dirjen sedang tugas di luar negeri juga. Nah, saya kalikan dulu karena memang biasanya prosedurnya seperti itu, apakah ini bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan mengingat besok hari Kamis kita sudah menutup masa sidang kita, di masa sidang ini.

Jadi, walaupun mau diundang lagi waktunya sudah tidak ada. Monggo, silakan Bapak Ibu Anggota sebelum saya memberikan kesempatan biar ini disepakati dulu oleh forum. Kalau saya pribadi tidak ada masalah sebenarnya karena ini kita sudah cek direktornya direktur yang memahami betul tentang terkait isu stunting. Silakan kepada Bapak Ibu anggota Panja.

Baik terima kasih banyak Bapak dan Ibu anggota Panja bisa memahami kondisi ini dan semua sudah menginformasikan kepada Pimpinan dan Pimpinan juga mencoba untuk memaklumi situasi ini.

Kalau yang rapat sebelumnya dari pimpinan tidak ada informasi sama sekali, tiba-tiba langsung hadir tanpa informasi Dirjennya berhalangan hadir. Jadi, kami menunda acara, tapi ketika hari ini memang sudah dikomunikasikan kepada melalui Setkom kepada Pimpinan, tentu saja ini menjadi satu permakluman dan kita sama-sama sedang berpikir bagaimana kita berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder* untuk menurunkan angka stunting yang hari ini masih, angkanya masih cukup tinggi juga sebenarnya.

Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu Anggota yang bisa memahami kondisi ini, kita lanjutkan ke Kementerian Sosial, Kemensos yang hari ini diwakili oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga yaitu Bapak Faisal, SST., M.Si dipersilakan.

**DIREKTUR JAMINAN SOSIAL KELUARGA KEMENTERIAN SOSIAL RI
(FAISAL, SST., M.Si):**

Baik, terima kasih Ibu pimpinan,
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat siang salam
sejahtera buat kita semuanya.

Yang saya hormati Ibu pimpinan beserta anggota Komisi IX dan juga
Bapak Ibu yang saya hormati dari Kementerian / Lembaga yang telah hadir
pada siang hari ini.

Pertama-tama kami ucapkan banyak terima kasih dan juga sekaligus
permohonan maaf dari pimpinan kami dalam hal ini Pak Dirjen Perlindungan
dan Jaminan Sosial yang kebetulan beliau sedang berada di luar negeri
mendampingi Ibu Menteri dan beliau juga menyampaikan salam hormat dan
sekaligus permohonan maaf kepada Ibu Pimpinan serta anggota lainnya.

Mohon izin kami dari Direktorat Jaminan Sosial yang kebetulan juga
mengampu program Keluarga Harapan yang notabene sasaran daripada
Program Keluarga Harapan ini adalah berjumlah 10 juta KPN.

Secara khusus, sama halnya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak
Dirjen dari Kementerian Agama, kami tidak ada alokasi khusus untuk anggaran
dalam kaitan percepatan penurunan stunting.

Namun, kami sebagai pengampu program di Direktorat Jaminan Sosial,
khususnya untuk program PKH ini, ada kegiatan yang kami singkat dengan
P2K2 ataupun penguat, Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang
di dalamnya kegiatan-kegiatan ini mengumpulkan para KPM untuk kami
berikan edukasi-edukasi terkait dengan modul-modul yang kami
selenggarakan di dalam kegiatan dimaksud. *Next.*

Sebelumnya kami akan sampaikan sedikit terkait dengan Program
Keluarga Harapan yang mana Program Keluarga Harapan ini adalah program
bantuan bersyarat yang diberikan kepada KPM kami dengan tujuan untuk
meningkatkan taraf hidup, yang kedua, mengurangi beban pengeluaran dan
peningkatan pendapatan, yang ketiga menciptakan perubahan perilaku dan
kemandirian, dan yang keempat adalah mengurangi kemiskinan dan
kesenjangan dan yang terakhir adalah mengenalkan manfaat produk jasa
keuangan formal. *Next.*

Nah, perubahan perilaku dalam PKH ini adalah untuk upaya yang kami
targetkan adalah terkait dengan bantuan sosial dengan cara pemenuhan
kondisionalitas sehingga terbentuk perilaku yang diinginkan. Yang kedua juga
pendampingan dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau
family development session.

Next, adapun kegiatan P2K2 ini merupakan proses belajar secara
terstruktur, untuk memperkuat terjadinya perubahan perilaku khususnya untuk

para KPM, PKH ini yang berjumlah saat ini 10 juta KPM dan yang kedua secara umum P2K2 ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, mengenai pentingnya pendidikan kesehatan dan pengelolaan keuangan bagi keluarga. *Next*.

Ini saya pikir bisa kita sama-sama lihat, nah terkait langsung aja ke modul dalam, *next* oke. Modul dalam pelaksanaan P2K2 ini eh pertama adalah modul kesehatan dan gizi yang menjadi sasaran dalam hal ini adalah ibu hamil dan juga balita dan juga pengasuhan yang kedua modul terkait dengan pengasuhan dan pendidikan anak terutama untuk anak yang usia sekolah dan yang ketiga terkait dengan pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha dan yang keempat adalah modul perlindungan anak yaitu pencegahan biasanya untuk pencegahan kekerasan pada anak dan juga penelantaran dan eksploitasi dan yang terakhir adalah modul kesejahteraan sosial.

Adapun dalam kaitan kami yang dalam untuk meng-*support* terkait dengan penurunan stunting ini, kami lebih mengambil peran di apa namanya di modul kesehatan dan gizi dan juga terkait dengan pengasuhan dan pendidikan terhadap anak.

Nah, ada beberapa kegiatan, *next*, ada kegiatan kami yang selalu kami lakukan karena kami di PKH ini terdapat 33.787 pendamping yang tersebar di seluruh Indonesia yang mana setiap bulannya mereka melakukan kegiatan P2K2 yang juga memberikan edukasi-edukasi dan juga pemahaman-pemahaman kepada KPM dibantu oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan yang ada di daerah-daerah penyelenggaraan kegiatan P2K2.

Nah, dalam hal ini kami juga memberikan makanan tambahan kepada KPM terutama ibu hamil dan juga balita khususnya untuk susu dan telur, setiap penyelenggaraan kegiatan P2K2, walaupun kami secara khusus tidak dialokasikan anggaran untuk penanganan ataupun percepatan penurunan stunting.

Nah, yang selanjutnya P2K2 ini menjadi syarat bagi KPM PKH di mana target PKH adalah 10 juta seperti yang kami telah sampaikan dengan anggaran 28,70 triliun di tahun 2024 dan P2K2 ini juga menjadi salah satu syarat PM tetap mendapatkan bantuan sosial karena melalui P2K2 ini diharapkan ada perubahan pola pikir dan pola pikir laku KPM menjadi lebih baik.

Yang selanjutnya adalah modul yang diberikan salah satunya terkait dengan kesehatan dan gizi berupa sosialisasi untuk pencegahan penyakit dan termasuk salah satunya adalah mencegah anak KPM menjadi stunting.

Yang selanjutnya dalam hal ini pendamping hanya melakukan sosialisasi saja, tidak berhak untuk menentukan stunting atau tidak, karena tidak, karena pihak yang berhak menentukan stunting adalah dari teman-teman di Kementerian Kesehatan ataupun dalam hal ini kalau di daerah adalah Dinas Kesehatan.

Dan yang terakhir adalah Kementerian Sosial melalui bantuan sosial PKH memastikan bahwa KPM mendapatkan sosialisasi yang cukup tentang pencegahan stunting sehingga mendukung untuk KPM menjadi lebih sehat.

Nah, di sini, *next*, peserta dan narasumbernya ini bisa sama-sama kita lihat, *next*, Adapun pesertanya ini adalah ibu-ibu KPM dan juga balita yang hadir di kegiatan P2K2 yang selanjutnya SDMPKH terdiri dari jenjang Korwil, Korkab ataupun Korkot yang berada di kabupaten kota dan juga koordinator kecamatan yang ada di kecamatan dan juga para pendamping yang mendampingi ampuannya masing-masing.

Adapun, adapun yang terlibat lainnya adalah dari Dinas Sosial, Perangkat Kecamatan dan juga kami sendiri yang suka turun ke lapangan langsung mengawal kegiatan dimaksud dan dalam hal ini juga narasumber juga kami suka diawasi oleh Bapak-bapak yang terhormat dari Komisi VIII, tenaga kesehatan dan juga pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan dan gizi.

Selanjutnya, *next*, nah pelaksanaan eh supervisi P2K2 ini kami mulai dengan koordinasi dengan daerah dan juga yang kedua adalah penimbangan berat badan pada saat pelaksanaan kegiatan dan diisi dengan narasumber terkait dengan edukasi ataupun pemberian pemahaman kepada KPM-KPM kami dan juga pemberian bantuan nutrisi dan setelah itu nanti ada sesi teman-teman KPM menyampaikan keluhan-keluhan ataupun hal-hal yang menjadi harapan ke depannya.

Nah, di tahun 2023 *next* kami bisa sampaikan bahwa ini lokasi-lokasi kami penyelenggaraan kegiatan P2K2 dan sudah di posisi 55 daerah dan tersebar di beberapa provinsi dengan hasil supervisi P2K2 ini, *next*, *next*. Hasil supervisi ya, bahwa hasil supervisi P2K2 ini pertama dalam rangka mendukung pencegahan dan penanganan stunting di kalangan KPM PKH maka pendamping PKH memerlukan dukungan dari semua pihak khususnya pemerintah daerah bukan hanya dalam koordinasi tetapi juga kolaborasi antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Yang kedua, pada sebagian kabupaten kota saat ini telah terbentuk Tim Penurunan Stunting Daerah, saat ini gencar mengkampanyekan penanganan stunting di wilayah, namun masih perlu dilakukan sinergitas dengan program-program *existing* di masing-masing Kementerian, seperti pelaksanaan P2K2 dalam PKH.

Yang selanjutnya adalah untuk bayi dan balita yang terindikasi mengalami stunting secara reguler tenaga kesehatan dari Puskesmas melakukan pemantauan secara rutin,

Dan yang terakhir adalah terkait kegiatan supervisi P2K2 dan pemberian paket nutrisi berupa susu, telur rebus dan buah pada kegiatan supervisi P2K2 bukanlah kegiatan yang memiliki *tagging* anggaran stunting melainkan hanya optimalisasi dari kegiatan dan anggaran yang ada di Kemensos.

Demikian mungkin Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu anggota yang dapat kami sampaikan, semoga apa yang kami sampaikan ini menjadi diskusi nantinya demikian. Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik, terima kasih banyak, Pak.

Kita lanjut lagi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Silakan kepada Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman (SSPIP) yaitu Pak Pandu Gunadi Atmosukarto, S.T.

Dipersilakan Pak.

DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (PANDU GUNADI ATMOSUKARTO):

Baik, *Bismillahirrahmanirrahim,*

Yang kami hormati Ibu pimpinan Komisi IX dan Bapak Ibu anggota Komisi IX Panja Penurunan Stunting.

Bapak Dirjen,

Bapak Ibu dari Kementerian / Lembaga lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera,

Salam sehat buat kita semua.

Pertama-tama, kami mohon izin menyampaikan permohonan maaf dari Dirjen dan sekaligus menyampaikan salam hormat Bu Dirjen dan kami ditugaskan untuk menyampaikan materi ringkas terkait dengan dukungan yang bisa dikontribusikan oleh Ditjen Cipta Karya untuk penanganan stunting.

Pertama-tama, kami ingin menyampaikan terkait dengan posisi Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya apabila kita melihat dari Perpres Nomor 27 tahun 2020 tentang tugas Kementerian PUPR, memang Direktorat Jenderal Cipta Karya melaksanakan,

KETUA RAPAT:

Pak Direktur, suaranya dikencengin dikit, katanya.

**DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARA
INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT RI (PANDU GUNADI ATMOSUKARTO):**

Baik, kurang dekat ya.

Baik, mohon izin, Ditjen Cipta Karya sesuai dengan Perpes 27 tahun 2020 memang kami ditugaskan untuk menyelenggarakan sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan pengelolaan persampahan, serta ada penataan bangunan gedung dan pengembangan kawasan pemukiman serta pengembangan sarana prasarana strategis.

Dan dalam pelaksanaannya kami Ditjen Cipta Karya juga bersama-sama dengan Bappenas, kemudian Kemendagri dan untuk beberapa isu tematik memang kami juga berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga lainnya, dengan Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, Menko Marves juga dan kementerian lain dan terkait dengan stunting dan PKI, Penanganan Kemiskinan Ekstrem juga kami berkoordinasi dengan BKKBN.

Dan tidak lupa juga apabila kaitannya dengan infrastruktur pemukiman maka tidak lepas dari tugasnya pemerintah daerah, baik itu provinsi dan kabupaten kota.

Secara khusus, untuk penanganan stunting dalam strategi nasional percepatan penjagaan stunting dari tahun 2018 sampai tahun 2024 dan juga sesuai dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Kementerian PUPR ini sebenarnya mendukung dalam penyediaan air minum dan sanitasi melalui bentuk intervensi gizi sensitif.

Ini terutama di pilar ketiga yaitu Konvergensi Program Pusat Daerah dan Desa dan memang dalam pendekatannya untuk sistem infrastruktur pemukiman ini, kita melihatnya sebagai satu sistem kesatuan yang utuh dari hulu sampai dengan hilirnya dengan mempertimbangkan bahwa penyediaan infrastruktur yang kita bangun itu harus yang paling efektif, paling efisien dan tidak membebani untuk biaya keberlanjutannya.

Nah, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya ini sebenarnya kami dari tahun sebelum tahun 2018 bahkan kita mempunyai program yang dilakukan berbasis masyarakat, Ibu Pimpinan jadi memang pendekatannya kita berbasis masyarakat.

Nah, ini tidak saja hanya atau tidak saja ditujukan untuk stunting saja dan kadang-kadang juga kami diminta dukungan untuk kaitannya dengan penanganan kemiskinan ekstrem, kemudian ada masalah gender, masalah lanjut usia jadi karena infrastruktur ini bisa ditarik mana-mana, jadi program kami yang terkait dengan infrastruktur masyarakat ini juga kami iriskan dengan lokasi-lokasi prioritas untuk mendukung beberapa lokasi tematik yang menjadi prioritas penanganan di nasional.

Terkait dengan stunting kami eh memilah kegiatan yang sangat terkait adalah Pembangunan Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat atau yang kita singkat Pamsimas dan ini memang ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum yang layak dan berkelanjutan.

Kemudian yang kedua, yang bisa dikaitkan dengan masalah stunting juga adalah pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat ini singkatannya kita Sanimas, ini juga ditujukan untuk menyediakan akses sarana dan prasarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

Kenapa ini disebut berbasis masyarakat, Ibu pimpinan, karena memang dari mulai kita melaksanakan dari mulai tahapan persiapan kemudian perencanaan pelaksanaan sampai dengan serah terimanya ini melibatkan semua pemberdayaan masyarakat.

Jadi, sejak awal persiapan dan perencanaannya ini dilakukan ada sosialisasi dulu dan dirumuskan diputuskan juga oleh masyarakat di mana dan apa yang harus dilakukan untuk penyediaan air minum atau sanitasi.

Bahkan, sampai pelaksanaannya juga ini melibatkan peran serta masyarakat dan kadang-kadang kita melakukan ini secara swakelola dengan melibatkan tim fasilitator dari eh masyarakat juga bahkan sampai dengan serah terimanya nanti juga kita masih membantu melakukan pendampingan untuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaannya juga.

Nah, berikutnya kami sampaikan juga berdasarkan pengalaman kami yang lakukan dengan infrastruktur berbasis masyarakat tersebut selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, Dirjen Cipta Karya telah memberikan dukungan program dengan total anggaran sebenarnya sudah sebesar Rp 7,24 triliun ini terdiri dari untuk program Pamsimas ini ada kegiatan di 21.529 lokasi untuk menyediakan 1,6 juta sambungan rumah dengan anggaran Rp 4,78 triliun.

Dan juga ada program Sanimas ini dilaksanakan di 5.989 lokasi ini untuk melayani 206.000 kepala keluarga dengan anggaran 2,46 triliun dan untuk di tahun 2024 kami juga masih eh merencanakan eh melaksanakan kegiatan yang bisa untuk berkontribusi dalam penanganan stunting eh di tahun 2024 ini dialokasikan anggaran sebesar 1,15 triliun yang terdiri dari program Pamsimas ini untuk dilaksanakan di 11.183 lokasi di Desa Kelurahan ya untuk melayani 189.000 sambungan rumah dengan anggaran 544,1 miliar kemudian program sanimas juga dilaksanakan di 1546 lokasi untuk melayani 54.000 KK dengan anggaran 611,2 Miliar.

Itu sekilas apa yang bisa dikontribusikan yang terkait dengan penanganan stunting dan kami juga ingin menyampaikan beberapa evaluasi atau isu yang dalam pelaksanaannya sampai dengan tahun 2023 kemarin yang kami rasakan.

Yang pertama mungkin memang terkait dengan prioritas lokasi yang mau ditangani lebih dahulu karena daerah stunting ini datanya ada hampir di seluruh kabupaten kota, Pimpinan.

Nah, ini mungkin apabila kita bandingkan dengan ketersediaan anggaran yang ada ini kita memang perlu dibantu dengan data yang lebih *rigid* yang lebih detail sebenarnya lokasi stunting yang bisa disepakati untuk diprioritaskan lebih dahulu dengan anggaran yang ada, ini mungkin yang mana.

Seperti kami pengalaman dengan penanganan kemiskinan ekstrem kami bersepakat dengan Kemenko PMK dan BKKBN menggunakan data PK21 untuk menentukan lokasi yang paling prioritas yang harus ditangani infrastrukturnya, itu yang pertama terkait dengan lokasi.

Kemudian yang kedua, kami berdasarkan apa yang sudah kami bangun infrastruktur yang kami bangun memang infrastruktur permukiman baik itu air minum dan sanitasi tidak bisa hanya infrastrukturnya saja dibangun, pengalaman kami terkait dengan kondisi rumah.

Nah, ini juga sama jadi kadang-kadang kita sudah membangun, toiletnya, kamar mandinya kita bangun juga air sarana prasarana air bersihnya tapi kondisi rumahnya juga, tidak layak gitu.

Nah, ini makanya kami mendapatkan arahan dari pak Menteri, bahwa di Cipta Karya gak bisa masuk sendiri ya, Ibu pimpinan kami juga diminta bersama Ditjen Perumahan mereka masuk dengan programnya BSPS untuk menangani rumah tidak layak huninya.

Jadi, selain rumahnya kita perbaiki, air minum sanitasinya juga kita perbaiki juga dan ada beberapa kasus untuk daerah-daerah yang lokasi airnya sangat terbatas kami juga dibantu oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air untuk kaitannya dengan suplai air bakunya.

Selain itu juga, selain dari infrastruktur kami juga merasakan bahwa ada kaitannya dengan pola hidup atau kebiasaan dari masyarakat yang juga perlu ada intervensi karena kadang-kadang dengan toilet yang bagus gitu, ya masyarakat masih ada keengganan untuk menggunakan toiletnya meninggalkan kebiasaan untuk menggunakan air di sungai atau untuk buang air di sungai.

Yang kedua dan yang ketiga yang kami rasakan, infrastruktur permukiman yang kita bangun itu, Ibu Pimpinan, bahwa diperlukan keberlanjutan untuk mengoperasikan dan untuk memelihara infrastrukturnya jadi ada hal yang menjadikan kendala kami adalah kesiapan terhadap masyarakat dan lembaga pengelola dari infrastruktur itu untuk melanjutkan operasi dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun.

Karena kalau ini tidak dibangun juga tidak disiapkan juga, maka apabila ada kerusakan ada kendala maka infrastruktur yang sudah dibangun tersebut ya menjadi rusak dan akhirnya menjadi mangkrak dan akhirnya layanan yang

diharapkan tidak bisa tercipta. Kemudian selain persiapan, masalah masyarakat dan lembaga pengelola.

Yang keempat, kami melihat juga dari infrastruktur yang sudah dibangun yang lambat laun makin berkembang semakin kompleks dan akhirnya akan ada kendala terkait dengan masalah regulasi terkait dengan tarif dan juga kaitannya dengan infrastruktur yang dibangun yang lebih kompleks yang ditangani oleh atau lembaga pengelolanya di daerah.

Saya rasa itu ada beberapa yang bisa kami sampaikan terkait dengan dukungan Ditjen Cipta Karya untuk penanganan stunting, lebih kurangnya kami mohon maaf.

Demikian, sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik terima kasih banyak. Kita lanjut lagi yang terakhir dari Kementerian Pendidikan Dasar dari Kemendikbud-DIKTI yaitu yang mewakili Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dihadiri oleh Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbudristek, yaitu Ibu Komalasari, M.Pd., dipersilakan.

DIREKTUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEMENDIKBUD-RISTEK RI (KOMALASARI, M.Pd):

Terima kasih, selamat siang,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Dirjen kami, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tidak bisa menghadiri undangan dari Panja karena ada tugas mendampingi Pak Menteri.

Dan izin Ibu, selaku Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Panja, pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan terkait dengan program pengembangan anak usia dini *holistik integratif* atau Paud HI sebagai intervensi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek untuk penurunan stunting. *Slide.*

KETUA RAPAT:

Sebentar Bu, izin ini karena saya sudah cek cukup tebal, mungkin nanti bisa lebih dipersingkat.

**DIREKTUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEMENDIKBUD-RISTEK RI
(KOMALASARI, M.Pd):**

Siap Ibu, terima kasih.

Jadi, kami di Kemendikbudristek khususnya di Direktorat PAUD mengawal intervensi sensitif di mana intervensi sensitif ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya ya berada di luar persoalan kesehatan, yaitu penyediaan air minum dan sanitasi pelayanan gizi dan kesehatan peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses untuk pangan bergizi. Dalam hal ini, sasarannya adalah satuan-satuan pendidikan anak usia dini yang ada di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. *Slide* berikutnya.

Dalam rangka intervensi sensitif ini di Direktorat PAUD kami melaksanakan kebijakan PAUD HI dan PAUD HI ini adalah Upaya Pengembangan Anak Usia Dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.

Tujuan dari program ini adalah agar seluruh anak usia dini mendapatkan layanan Pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan dan perlindungan anak yang optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Dalam rangka eh program PAUD HI ini maka satuan-satuan PAUD harus memenuhi 8 indikator yang sudah ditetapkan dan 8 indikator ini telah dipantau melalui Dapodik atau Data Pokok Pendidikan.

Selanjutnya, ini adalah dasar hukum dari PAUD HI, saya lewati. Baik, Bapak Ibu semuanya, 8 indikator PAUD HI yang saya sampaikan tadi adalah yang pertama adalah di satuan-satuan PAUD melakukan kelas orang tua, Wahana untuk berbagi informasi mengenai kebutuhan esensial anak, kemudian pemantauan pertumbuhan anak seperti tinggi atau berat badan dan lingkaran kepala.

Kemudian pemantauan perkembangan anak, berkoordinasi dengan unit lain terkait pemenuhan gizi dan kesehatan, kemudian satuan-satuan PAUD menerapkan PHBS, melalui pembiasaan dan kemudian yang keenam memberikan PMT atau makanan tambahan dan atau makanan bergizi secara berkala minimal 3 bulan sekali, kemudian yang ketujuh satuan PAUD juga memantau kepemilikan identitas atau NIK peserta didik serta ketersediaan fasilitas, maaf fasilitas sanitasi dan air bersih, minimal menggunakan material sederhana dan ada air mengalir.

Dalam rangka PAUD HI ini maka datanya telah dipantau melalui Dapodik dengan kriteria minimal 6 dari 8 indikator, maka satuan PAUD sudah bisa dikatakan mengimplementasikan PAUD HI dan satuan-satuan PAUD Indonesia juga melakukan pemutakhiran Dapodik secara berkala.

Targetnya sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 maka di 2024, 70% satuan PAUD di Indonesia telah mengimplementasikan PAUD HI dan

penanggung jawab ini adalah pemerintah daerah di mana Kemdikbudristek memberikan dukungan berupa intervensi.

Yang pertama adalah memberikan bantuan pemerintah kepada kabupaten kota sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian kami juga melakukan peningkatan kapasitas kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melakukan pelatihan calon pelatih atau fasilitator PAUD HI, melakukan pendampingan dan pemantauan serta juga menjalin kemitraan dengan mitra-mitra dalam mendukung PAUD HI. *Slide berikutnya.*

Nah, ini kami sampaikan anggaran yang dikelola oleh Direktorat PAUD terkait dengan Program PAUD HI, jadi, ada dua anggaran yaitu terkait dengan bantuan pemerintah yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah dalam Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan dukungan manajemen. Jadi, di 2020 di 12,6 Miliar dan di 2024 ini di 15,33 Miliar dan di sini kami berikan merah karena masih diblokir oleh Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, iya, bisa kita lewati saja ya, ini juga. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah kriteria bantuan pemerintah yang diberikan kepada kabupaten kota, tentunya yang pertama adalah kabupaten kota yang berada di *long stunting*, kemudian yang memiliki prevalensi stunting tinggi berdasarkan data Survey Studi Gizi Indonesia atau SSGI. Kemudian juga kabupaten kota yang telah memiliki Perbuk atau Perwal terkait PAUD HI atau kabupaten kota yang memiliki draf Perbuk atau Perwal.

Berikutnya, nah sampai saat ini jumlah kabupaten kota yang telah mendapatkan bantuan pemerintah dan telah ditingkatkan kapasitasnya, melalui aktivitas penyusunan regulasi dan bimbingan teknis PAUD HI ada 200 kabupaten kota sampai dengan tahun 2023.

Berikutnya, dan ini adalah fasilitator PAUD HI yang telah dilatih oleh Kemdikbudristek Direktorat PAUD ada 2000 orang fasilitator yang mana fasilitator ini terdiri dari unsur Dinas Pendidikan.

Kemudian ada organisasi Mitra dari pusat kegiatan Gugus PAUD, satuan-satuan PAUD dan pegiat akademisi maupun dari komunitas-komunitas PAUD di mana masing-masing daerah yang mendapatkan intervensi bantuan PAUD HI ini memiliki 10 fasilitas PAUD HI yang diberikan bimbingan teknis.

Selanjutnya dan ini adalah jumlah satuan PAUD yang telah mendapatkan bimbingan teknis PAUD hii dari dinas kabupaten kota dengan menggunakan dana banem itu ada 20.000 satuan PAUD sampai dengan 2023.

Berikutnya, dan ini juga Direktorat PAUD telah melakukan kemitraan dengan UNICEF dan juga *World Bank* untuk mendukung PAUD HI, berikutnya dan berikutnya sampaikan hasil intervensi yang sudah kami lakukan terkait dengan program PAUD HI ini adalah data kabupaten kota yang telah diintervensi sepanjang 2020-2023.

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar atau 12% dari 200 kabupaten kota itu ada di provinsi Jawa Tengah kemudian disusul Aceh kemudian 13 kabupaten kota lainnya adalah Sumatera Utara dan seterusnya kemudian juga provinsi Sumatera Barat dan provinsi lainnya di bawah 5%.

Selanjutnya dan ini adalah *output* dari intervensi PAUD HI Kemendikbudristek tahun 2020, jadi sudah ada 200 kabupaten kota yang telah memiliki regulasi terkait dengan PAUD HI termasuk di dalamnya memiliki SK gugus tugas dan rencana aksi daerah untuk PAUD HI kemudian 200 Dinas Pendidikan Kabupaten Kota telah, telah menerima intervensi untuk peningkatan kapasitas.

Terkait PAUD HI, 2000 fasilitator daerah 20.000 satuan PAUD kemudian juga 200 kabupaten kota telah didampingi dan tentunya seluruh satuan PAUD melakukan pemantauan dan *updating* data terkait dengan pemenuhan 8 layanan esensial PAUD HI melalui sinkronisasi data di Dapodik.

Selanjutnya kami laporkan, Bapak Ibu, bahwa data Dapodik kami menunjukkan bahwa satuan-satuan PAUD yang telah memenuhi minimal dari 8 indikator sampai saat ini berdasarkan *cut off* kami di bulan Mei 2024 ini sebanyak 159.610 atau sebesar 78,20% satuan-satuan PAUD telah memberikan layanan PAUD HI minimal 6 dari 8 indikator.

Namun, tentu kami juga ingin menyampaikan bahwa dari 8 indikator yang capaiannya terendah adalah di indikator ke-8, yaitu pemenuhan sanitasi dan ini tentunya kami juga berharap kita bisa berkolaborasi dengan Kementerian PUPR yang juga hadir saat ini bagaimana nanti data-data satuan PAUD kami yang capainya rendah di indikator yang ke-8 yaitu pemenuhan sanitasi memerlukan dukungan lebih lanjut

Selanjutnya dan ini adalah prevalensi stunting kabupaten kota intervensi yang telah diintervensi oleh Direktorat PAUD bahwa dari di tahun 2020 sebanyak 38 kabupaten kota atau 76% itu telah mengalami penurunan prevalensi stunting dan sampai tahun 2023 ada 74% kabupaten kota yang juga telah mengalami penurunan prevalensi stunting data lengkapnya dapat dilihat di *link* yang telah kami siapkan.

Selanjutnya dan Bapak Ibu ini adalah contoh dari regulasi yang dihasilkan dari intervensi PAUD HI dan terakhir *slide* berikutnya, kami juga melakukan berbagai strategi komunikasi dan publikasi untuk memastikan satuan-satuan PAUD kami, satuan-satuan PAUD kita di Indonesia terintervensi untuk melakukan perubahan perilaku.

Beberapa strategi yang dilakukan adalah webinar kemudian publikasi di media sosial dan kami juga memiliki NPK seri ke-9 khusus tentang bagaimana satuan PAUD mengimplementasikan PAUD. *Slide* berikutnya.

Demikian yang dapat kami sampaikan, terima kasih selamat siang,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik, terima kasih banyak atas paparan dari empat Kementerian yang hadir pada hari ini.

Selanjutnya, untuk pendalaman, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu anggota yang terhormat dari Panja Stunting, dipersilakan.

Di meja pimpinan sudah ada tiga penanya Pak KH. Anas Thahir dari PPP dipersilakan, lanjut nanti Pak Nuradi dan lanjut ke Pak Yahya. Monggo, Pak dipersilakan.

F-PPP (Sy. ANAS THAHIR):

Terima kasih,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan yang terhormat, para Mitra yang saya hormati.

Saya ingin sedikit memberikan catatan dari paparan yang disampaikan oleh Kementerian Agama sebab saya termasuk yang meyakini ini bahwa upaya menekan tingginya akar stunting ini salah satu cara efektif adalah dengan pendekatan keagamaan.

Dalam catatan saya, angka stunting ini berkorelasi langsung dengan angka pernikahan usia dini, jadi di mana tingkat pernikahan usia dini ini tinggi, maka angka stunting juga akan tinggi.

Kalau tidak salah, di catatan Kementerian Agama tahun 2018 itu yang nikah usia dini itu masih 1.000.100 pasang lebih dan dari angka itu 400.000 lebih cerai. Itu semakin meyakinkan bahwa pernikahan usia dini itu sangat berhubungan dengan tingkat tingginya angka stunting di Indonesia.

Nah, pertanyaan saya sejauh mana selama ini Kementerian Agama ini memanfaatkan tenaga-tenaga penyuluh yang jumlahnya puluhan ribu itu loh, Pak.

Saya kira kalau puluhan ribu tenaga penyuluh Kementerian Agama ini dikerahkan juga untuk menyampaikan penyuluhan dengan tema penurunan angka stunting itu akan memberikan manfaat cukup besar.

Jangan sampai penyuluh-penyuluh ini lebih dimanfaatkan untuk muatan-muatan lain, ada Pilkada penyuluh ikut ngomong, ada Pilpres penyuluh ikut ngomong lagi, pas stunting enggak ikut ngomong.

Ngomong-ngomong, hari ini Menteri Agama bicara perlu anggaran berapa itu 17 triliun untuk ikut serta melakukan intervensi terhadap gerakan

stunting, tinggi sekali pak. 17 triliun. BKKBN saja anggarannya cuma 7 triliun. Ini Kementerian lain yang tidak langsung menangani stunting bisa sekian kali lipat dari anggaran BKKBN.

Saya hanya minta, Pak, bagaimana Kementerian Agama ini juga lebih fokus pada daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi. Saya ini dari Dapil Jawa Timur III, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Dari tiga itu dua di antaranya itu stuntingnya paling buruk di Jawa Timur. Situbondo dan Bondowoso, ada lagi tetangganya, Jember ini tiga serangkai yang angka stuntingnya tinggi dan angka perceraianya tinggi dari tahun ke tahun.

Tapi Kementerian Agama kalau melakukan intervensi misalnya dengan melakukan penyuluhan terhadap apa tadi Bimwin, Binwim apa tuh. Itu sama aja dengan yang dilakukan di Banyuwangi. Mestinya di Banyuwangi yang stuntingnya lebih rendah yang angka perceraianya lebih rendah, lalu Situbondo yang lebih tinggi.

Misalnya Situbondo lebih digedor lagi, Pak. Artinya *stressing* programnya ada di situ supaya ada perubahan, karena selama bertahun-tahun Situbondo itu di atas 30% angka stunting di marbang hari ini sudah 18%.

Lah, walaupun kementerian agama itu memanfaatkan tadi ormas katanya yang NU Muhammadiyah, Fatayat Muslimat, kalau yang diperbanyak tetap di daerah yang stuntingnya rendah, Pak, efeknya rendah. Saya minta intervensi dilakukan di daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi.

Terima kasih,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak Kiai Anas.
Kita lanjut ke Pak Nurhadi dari Nasdem, silakan, Pak.

F-P. NASDEM (NURHADI, S.Pd):

Terima kasih pimpinan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Panja Komisi IX serta para Dirjen atau Direktur yang mewakili Kementerian masing-masing.

Yang pertama, saya menyambung apa yang disampaikan Pak Anas karena saya juga pernah berkunjung ke Bondowoso ternyata saat itu saya bersama dengan BKKBN di Bondowoso ini cukup tinggi angka stuntingnya ini disebabkan oleh pernikahan dini yang Pernikahan Dini ini bisa terjadi karena dijodohkan.

Jadi peran dari Pondok Pesantren ini seorang Kiai mempunyai anak, kemudian dijodohkan juga dengan seorang Kiai dari pondok pesantren lain, ini padahal usianya masih, masih usia dini begitu.

Dari BKKBN, saya lakukan teguran itu terkendala kaitannya dengan sosialisasi ke pondok pesantren karena ini di bawah naungan dari Kementerian Agama.

Saya setuju bahwa penanganan stunting ini khususnya di Kementerian Agama ini tidak disamaratakan, Pak. Khususnya di daerah-daerah yang memang stuntingnya cukup tinggi ini *by custom* alias lakukan seperti yang disampaikan Bapak tadi, bimbingan perkawinan calon pengantin, khususnya Kementerian Agama ini bisa masuk ke pondok-pondok pesantren.

Kita merangkul para Kiai, para alim ulama, para habaib untuk mengegolkan program percepatan penurunan stunting ini. Jadi, tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah menjadi tanggung jawab tokoh masyarakat, tapi akan lebih efektif lagi kalau kita juga melibatkan para alim ulama khususnya di beberapa daerah yang saya sebutkan tadi itu, Pak.

Kemudian yang kedua, izin saya menyampaikan untuk Kementerian PUPR. Kementerian PUPR, Saya ingin tahu sebenarnya ada berapa rumah tangga yang masih belum punya memiliki akses air bersih dan akses sanitasi yang aman di Indonesia ini, apakah Kementerian PUPR punya data jumlah detailnya ada berapa rumah tangga karena kalau yang saya ikuti yang baru-baru acara ini di Bali, ya, liputan di acara World Water di Bali pada Februari kemarin.

Forum tersebut menyatakan 20% masyarakat Indonesia yang mampu mendapatkan air bersih mendapatkan akses air bersih dan juga hanya 19,47% rumah tangga yang memiliki akses terhadap air pipa.

Pertanyaan saya, jadi ingin tahu secara detail atau tepatnya jumlah rumah tangga di Indonesia ini yang belum mempunyai akses air bersih dan akses sanitasi yang aman. Kemudian kenapa baru 20% yang bisa mendapatkan akses air bersih ini? Mohon disampaikan juga kaitannya dengan kendalanya.

Terima kasih, Pimpinan,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Selanjutnya Pak Yahya dari Golkar, dipersilakan.

F-P. GOLKAR (M. YAHYA ZAINI, SH):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang, Selamat siang apa sore, nih? Sore ya, menjelang sore.

Pimpinan yang saya hormati, para Anggota Komisi IX Panja Penurunan Stunting, Bapak-bapak dan Ibu para tamu undangan yang mewakili kementerian dan Lembaga.

Pertama, saya ingin menyoroti bahwa program stunting ini adalah program nasional yang gagal, karena angka penurunannya cuma 0,1% itu diakui oleh Kementerian Kesehatan untuk tahun ini dari 2022 ke 2023 penurunannya adalah 0,1%.

Artinya kan gagal ini, Pak. Karena gagal maka sekarang Bappenas menaikkan targetnya, ya kan, dari 14% tahun 2024 menjadi 18,8% pada tahun 2025.

Ini kan proyek gagal ini, karena ini proyek gagal saya ingin menyoroti dari tiga hal. Gagal dari segi kebijakan dan program, gagal dari segi penganggaran dan gagal dari segi koordinasi.

Dari segi kebijakan Perpres 72 Tahun 2021 gak berhasil menurut saya. Kenapa Presiden memberikan *leading sector* sebagai ketua pelaksanaannya itu kepada BKKBN, sementara BKKBN bukan Kementerian. Bagaimana mungkin BKKBN melaksanakan koordinasi sementara derajatnya tidak sama dengan Kementerian.

Saya mengusulkan Ibu Ketua, agar supaya salah satu rekomendasi dari Panja ini adalah merubah Perpres Nomor 72 tahun 2021 jadi yang menjadi *leading sector* jangan BKKBN, tapi Kemenkes hingga sederajat. Ini usulan saya ini supaya menjadi rekomendasi dari Panja ini untuk pemerintahan yang akan datang.

Yang kedua, dari segi anggaran. Tadi di grup WA grup Panja tertera bahwa ada 30 triliun anggaran dari 18 kementerian dan Lembaga, terbesar adalah Kementerian Sosial, 20 triliun, yang kedua, Kementerian PUPR 1,2 triliun. Artinya, dari segi penganggaran juga tidak berhasil ini. Anggarannya besar, Iya kan. Tapi hasilnya tidak, tidak ada atau tidak tercapai.

Nah, barangkali ke depan juga perlu diskusikan re-alokasi anggaran ini, kepada mana Kementerian yang paling banyak melakukan intervensi. Nah, sekali lagi saya mengatakan intervensi yang paling besar itu adalah intervensi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, mestinya anggaran kesehatan itulah yang diperbesar.

Nah, yang ketiga dari segi koordinasi. Sejak ada Perpres 72 Tahun 2021, Bapak-bapak tahu tidak berapa koordinasi yang dilakukan oleh BKKBN dengan Kementerian yang Bapak-bapak pimpin atau yang Kementerian yang

bapak ada di dalamnya, ya kan? Kalau ini tidak jalan koordinasinya, berjalan sendiri-sendiri.

Ini kelihatan, Ketua. Contoh, misalnya dari pemahaman yang ada di Komisi IX intervensi spesifik itu yang paling utama adalah pada 1000 hari pertama kehidupan sejak di kandungan, Sampai usia 2 tahun itu yang paling menentukan, ya, kan.

Karena, kalau kandungannya tidak sehat, asupan gizinya berkurang maka bayi yang lahir tidak normal kurang dari 2,5 kilo beratnya dan panjangnya kurang dari 45 cm atau tingginya. Itu dipastikan bahwa bayi tersebut adalah terkena stunting. Nah, stunting ini menurut Kementerian Kesehatan adalah sulit sekali untuk diobati, bahkan tidak bisa diobati.

Menurut Kementerian Kesehatan hanya 20% keberhasilan, tingkat keberhasilan stunting itu bisa diobati. Artinya apa? yang diutamakan adalah pencegahan, nah pencegahan ini ada dua tahapannya menurut BKKBN, satu pencegahan dari hulu yang kedua pencegahan dari hilir.

Dari hulu sejak kapan, sejak remaja. Nah, sejak remaja ini bisa digotong royong ini programnya dari Kemenag harus ada, dari Kementerian apa, Kemendikbud-Dikti harus ada, ya kan. Karena calon pengantin ini harus diberikan wawasan dan pengertian agar ketika nikah nanti, tidak, anaknya tidak terkena stunting.

Oleh Kementerian Kesehatan diberi program Pil Tamba, Tambah Darah ya kan, Pil Tambah Darah itu program Kementerian Kesehatan. Nah, kalau kita melihat tadi fokusnya kok ke PAUD, ya, kan, itu tidak ada pengaruhnya dengan stunting, karena sudah melampaui 1000 hari pertama kehidupan.

Mestinya fokusnya kepada anak usia dini, iya kan. Maksud saya kepada usia sebelum pernikahan, yaitu pada usia sekolah. SMA terutama, ya kan, SMA. Jadi, intervensinya kepada SMA diberikan pengertian nanti kalau hamil adalah seperti ini.

Yang kedua, kalau nikah usianya harus 21 tahun, bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, itu idealnya, karena secara medis dan mental sudah siap bagi perempuan terutama.

Jadi ini menurut saya kelihatan bahwa koordinasinya tidak ada, ya kan sehingga tidak fokus. Anggarannya besar, iya kan Tapi tidak efektif untuk menurunkan stunting.

Nah, yang terakhir saya ingin ke Linjamsos, ya, ada ya pak. Nah, Linjamsos ini khususnya Kementerian Sosial sejak Bu Risma menjadi Mensos ada perubahan kebijakan penyaluran BPNT, betul, Pak ya? ya saya walaupun komisi IX tahu juga Pak, karena Mitra saya apa namanya konstituen saya juga banyak dari PKH, iya dan penerima manfaat, ya.

Jadi, ada perubahan dulu penyaluran bantuan itu adalah non tunai khususnya beras dan telur, Betul Pak, ya. yang dikerjasamakan dengan warung-warung dan multiefek *multiplier* efeknya besar sekali itu Pak, iya kan.

Sehingga pengusaha-pengusaha kecil menengah termasuk orang hidup tapi kalau Bu Risma dirubah ini semuanya tunai, *cash* yang disalurkan melalui pos dan bank.

Nah, karena penyaluran bantuannya adalah dalam bentuk *cash* gak bisa dikontrol penggunaannya, Pak dari Kemensos ini gak bisa dikontrol, Pak saya sudah tanya itu bisa dijamin enggak semuanya dibelikan makanan atau kebutuhan pokok gak bisa, iya kan. Ada yang beli pulsa untuk ibunya, iya. kan ada untuk bapaknya dibelikan rokok, ya kan, ada dibelikan jajan gak bisa dikontrol Pak, ya kan karena peruntukannya *cash*, iya kan. Kalau dulu langsung barang, gak bisa diotak atik itu yang diterima barang, beras dan telur, iya kan.

Nah, sekarang enggak bisa dikontrol penggunaannya. Siapa yang ngontrol, ada evaluasinya enggak di Kementerian Sosial? gak ada Saya kira, ya kan. Berapa penerima manfaat 9 juta apa 10 juta itu, iya kan.

Nah, bagaimana mungkin bisa menurunkan stunting kalau tidak efektif penyaluran bantuannya Saya melihat lebih efektif yang dulu pak ya karena langsung diterima barang, gak mungkin diterima apa uang *cash* karena telur itu termasuk salah satu protein hewani yang sangat diperlukan, ya kan bagi ibu hamil.

Menurut Kementerian Kesehatan jadi orang ibu hamil itu harus mendapatkan asupan gizi yang cukup, khususnya protein hewani itu adalah daging, ayam, telur ikan, ya kan dan susu. Kita agak hafal sedikit, Pak, karena tiap minggu turun ke lapangan bersama BKKBN, ya, kan.

Jadi, menurut saya perlu evaluasi nih, pak kebijakannya nanti akan kami usulkan di Banggar nanti, ya. Supaya kebijakan non-tunai ini dikembalikan ke apa tunai ini dikembalikan ke non-tunai sehingga tepat sasaran.

Nah, Saya kira itu, Bu Ketua keberatan saya, jadi kesimpulannya memang ini program kebijakan programnya tidak efektif, anggarannya tidak efektif koordinasinya sangat lemah.

Jadi, karena tiga hal inilah maka angka penurunan stuntingnya hanya 0,1% sangat disayangkan sekali, ya kan, dengan anggaran yang begitu besar. Terima kasih.

*Billahitaufik walhidayah,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

*Waalikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
Ada lagi Bapak dan Ibu atau sudah?*

F-P. DEMOKRAT (Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oh, Bu Aliyah, lanjut Pak Alifuddin. Bu Aliyah dari Demokrat, dipersilakan.

F-P. DEMOKRAT (Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE):

Terima kasih
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan bersama sahabat-sahabat Komisi IX dan juga tamu yang hadir pada sore hari ini.

Saya tidak berpanjang lebar, saya memberikan apresiasi dan juga terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan oleh beberapa Kementerian yang hadir pada sore hari ini.

Terkait daripada memahami bahwa peraturan Perpres 21 tahun, 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting bahwa Kementerian yang hari ini hadir merupakan sebagian besar adalah anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Kami ingin mendapatkan penjelasan tentang pola koordinasi yang dilakukan selama ini agar setiap program yang dijalankan oleh masing-masing kementerian dan lembaga yang daya ungkit untuk penurunan stunting dan juga terkait apa, ada ego, sektoral dari masing-masing kementerian dan lembaga tersebut khusus untuk Kementerian Sosial.

Kami melihat daripada program keluarga harapan PKH bagaimana Kementerian memastikan program PKH ini tepat sasaran dan di samping daripada itu juga apakah berimplikasi positif untuk penurunan stunting. Mohon penjelasan dari Kementerian Sosial.

Dan selanjutnya, untuk Kementerian Agama mungkin juga saya melihat daripada program, perlu dukungan melalui Perda-Perda dari kabupaten dan kota serta beberapa dari daerah yang lainnya ya bagaimana dielaborasi sehingga program-program catin dan juga untuk remaja bisa ditingkatkan kolaborasinya dengan Pemda sehingga juga ada dukungan dari Perda-Perda tersebut.

Karena melihat permasalahan pernikahan dini banyak yang sifatnya menjadi bagian dari kultural khususnya juga di daerah-daerah terpencil seperti tadi yang sudah diungkapkan terkait dengan pernikahan dini dan juga apalagi di daerah saya, terlepas daripada pernikahan dini ada juga pernikahan yang sifatnya dijodohkan oleh kedua orang tua.

Nah, kalau melihat di halaman 4, Saya butuh juga penjelasan daripada Kementerian Agama terkait daripada anggaran bimbingan keluarga sebesar Rp14.360.682 ini apakah per paket atau perorangan dan juga ada bimbingan catin juga sebesar Rp69.930.573 dan juga bimbingan remaja sebesar Rp1.986.060.

Nah, kami butuh penjelasannya sejauh mana ee pencapaian daripada program-program ini apakah program ini dielaborasi juga dengan terlepas tadi yang sudah disampaikan oleh Pak, siapa tadi, ya terkait dengan kaitan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama itu hanya dikhususkan tadi kalau dari, dari segi muslim, bagaimana sifatnya dengan non, dengan yang non-muslim.

Dan yang satu lagi untuk Kementerian Kemendikbudristek, sangat penting untuk memberikan pemahaman tentang nutrisi, nutrisi yang tepat khususnya pemberian protein, karena saya tidak melihat di sini ada dicantumkan pemberian nutrisi protein yang tinggi kepada orang tua terutama ibu anak-anak PAUD, ya yang masih eh sekiranya di periode golden age nanti apakah ini sudah betul-betul dilakukan.

Saya kira cukup dari saya lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih. Lanjut ke Pak Alifuddin dari Fraksi PKS dipersilakan.

F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M):

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan dan Anggota Komisi IX beserta Mitra yang hadir ya. Ini pertanyaan kami satu tentang persiapan perkawinan, ya. Mulai Departemen Agama, jadi kami sangat mendukung nih, kalau calon pengantin itu diberikan sertifikat gitu, Pak, ya.

Tapi, bimbingannya bukan hanya 1 jam 2 jam itu kalau bisa 3 hari training, penataran, pelatihan sehingga mendapatkan bekal-bekalan yang sangat kuat.

Pada saat saya dulu nikah tahun 88, hanya dikasih nasihat 1 jam lah, kadang-kadang kurang dari 1 jam. Ini sangat penting sekali dalam rangka mencegah keluarga yang stunting.

Sampai itu juga pengetahuan-pengetahuan lainnya tapi yang paling pokok yang kami tekankan karena terkait agama mungkin usulan kami ya,

Jadi kalau anggarannya kurang ya, mungkin menjadi perlu perhatian kita Bersama.

Jadi kami sangat, pada saat kami sosialisasi, BKKBN juga ke masyarakat dan terkadang juga hadir KUA, ya, kami menyarankan, ya karena kami bukan Komisi VIII mungkin melalui sini, kami sampaikan aspirasi kami, ya, aspirasi di Dapil agar ada sertifikat, sertifikat kesiapan layak nikahnya, Pak. Ada pemahaman yang khususnya agama Islam itu memang layak untuk nikah, sehingga bukan hanya umurnya ya memang umurnya perempuan 21 tahun, laki laki 25 tahun, ya tetapi mentalnya juga memiliki keimanan yang kuat gitu, ya.

Mungkin itu saja sebagai tambahan, Bu karena sudah banyak dari masukan-masukan lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Baik, terima kasih.

Pak Dirjen dan Bapak Ibu Direktur ni, Panja hari ini sangat istimewa langsung dihadiri oleh 3 pimpinan dari 5 pimpinan Komisi IX, nih. Terima kasih nih, Pak Charles Honoris dari PDIP dan Ibu Ketua Komisi IX, Bu Felly.

Tadi disampaikan oleh Pak Yahya, ya, saya juga ingin menambahkan terkait dengan sinergi. Sepertinya memang kalau melihat dari sejak awal Panja ini berjalan ya, Pak Yahya memang sangat terlihat masih muncul egosektoral masing-masing ya. Itu yang memang mungkin nanti menjadi hasil masukan dari Panja ini supaya ke depan bisa lebih terintegrasi dan sinerginya lebih kuat.

Nah, tentang anggaran nih, Pak Dirjen dan Bapak Ibu Direktur, di 2023 data yang kami dapatkan itu ada 18 Kementerian dan Kelembag, Badan yang mendapatkan alokasi anggaran RO yang mendukung program percepatan penurunan stunting itu 2023, 2024 emang kita mencoba mencari tapi belum dapat.

Itu *full* itu dapat semua nih, Kemensos dapat, Kemendikbud dapat, Kemenag dapat, apalagi DPR, nih paling besar nih, ya. Artinya semua Kementerian yang terlibat dan semua Badan yang terlibat di dalam penanganan stunting, itu semua mendapatkan porsi anggaran. Makanya agak kaget ketika tadi sebagian mengatakan tidak ada alokasi anggaran khusus gitu, ya.

Tapi memang ya, kayak program tadi dari hulu kan program harian Kemenag, ya emang ya, Pak Dirjen, ya. Artinya tanpa ada stunting pun program itu tetap berjalan, kan, ya artinya tidak ada yang spesifik.

Nah, ini mungkin nanti bisa jadi masukan bagi kami untuk disampaikan juga, apa namanya penambahan dan alokasi anggaran ya, Pak, Pak Menag sendiri nih saya baca meminta tambahan anggaran untuk alokasi stunting tadi disampaikan oleh Pak, Pak Kiai, ya. Artinya meminta tambahan anggaran untuk alokasi stunting juga nih, dari Pak Menteri Agama.

Silakan Bapak dan Ibu, Pak Dirjen dan Bapak Ibu Direktur untuk menanggapi, mungkin secara garis besar saja, detailnya nanti bisa disampaikan jawabannya secara tertulis, karena Panja ini belum berakhir jadi kita masih bisa mempelajarinya dan nanti sinergi lagi di rapat-rapat yang berikutnya.

Dipersilakan dari Pak Dirjen terlebih dahulu. Monggo, Pak.

**DIRJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI
(Prof. Dr. Phil. H. KAMARUDIN AMIN, MA):**

Baik, terima kasih, Pimpinan, Bapak Ibu anggota yang saya hormati.

Pertama, terkait dengan koordinasi ya, kami cukup berkoordinasi dengan BKKBN ada beberapa program yang kita jalankan bersama dan ada bahkan sampai kepada regulasi yang kami adaptasi untuk mengakomodir rencana penanganan stunting ini.

Misalnya gini, Bu. Dulu ketika orang mau menikah harus mendaftar di SIMKA itu paling lambat 2 minggu sebelum menikah. Itu jadwalnya. Kemudian kita rubah menjadi 3 bulan, sebelum menikah paling lambat 3 bulan sebelum menikah sudah harus mendaftar di SIMKA.

Karena kita memberikan kesempatan kepada calon pengantin dan Kemenkes BKKBN untuk memberikan intervensi, misalnya ketika dia mendaftar ternyata ke Puskesmas kemudian ada kendala kesehatan, misalnya Katakanlah lingkaran tangannya tidak mencukupi dan lain-lain, hasil pemeriksaan Kemenkes itu bisa diberikan intervensi sebelum melaksanakan pernikahan.

Itu kita buat aturan, kita merubah Peraturan Menteri Agamanya kita rubah, untuk bisa mengakomodir kepentingan itu. Itu salah satu di antara bentuk koordinasi yang kita lakukan.

Kita juga misalnya melibatkan penyuluh di seluruh Indonesia, Kami punya penyuluh itu sekitar 50.000, Pak, Pak Kiai, di seluruh Indonesia dan tadinya stunting itu bukan tugasnya penyuluh agama sebenarnya.

Di Kementerian Agama sendiri punya banyak sekali tugas penyuluh, kita itu tapi untuk menangani stunting ini kami menambah tugas penyuluh, jadi kami buat surat keputusan Dirjen untuk menambah salah satu tugas penyuluh itu adalah memberikan literasi kepada masyarakat terkait dengan stunting ini jadi mereka sudah bekerja di bawah, bahkan berkoordinasi juga dengan penyuluh-penyuluh BKKBN, gitu.

Jadi mereka secara masif melakukan kegiatan itu meskipun sekali lagi, Bu Mohon maaf saya menyebutkan itu tidak ada sama sekali anggaran stunting di situ. Jadi, penyuluh kami libatkan, penghulu-penghulu kami libatkan semuanya, bimbingan perkawinan kami lakukan, sama sekali tidak ada anggaran stunting.

Itu anggaran, anggaran rutin kami yang tanpa ada stunting pun juga dilaksanakan begitu, hanya menambah apa namanya tugas dari penyuluh-penyuluh kita.

Kalau memang masalah keluarga ini masih cukup besar, cukup banyak ya. Mulai dari angka perceraian, kemudian Pernikahan Dini, kekerasan dalam rumah tangga, stunting dan seterusnya.

Nah, intervensi kami yang kami anggap paling strategis dan relevan memang di bimbingan perkawinan, karena adalah persoalan yang ditangani di hulu gitu. Jadi, semua berangkat berawal dan dari saat mereka mau menikah begitu.

Sehingga yang kami lakukan intervensinya adalah pertama, memberikan bimbingan kepada apa namanya, usia pra nikah itu. Jadi, sebelum mereka menikah kita bekerja sama dengan berbagai komunitas, bekerja sama dengan kampus, ormas-ormas Islam untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak usia pra nikah sebelum mereka menikah. Tapi, ini tentu tidak bisa masif karena ya terkait dengan berbagai keterbatasan-keterbatasan.

Kemudian, di bimbingan perkawinan ini seperti yang kami tadi jelaskan, ini kami anggap sangat strategis karena mereka yang akan membina keluarga berkualitas tanpa stunting, sehingga kami mewajibkan ya, kami mewajibkan seluruh calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan yang sebelumnya sebelumnya kami membimbing sesuai dengan ketersediaan anggaran. Seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa yang maksimal bisa kami lakukan itu sekitar 500 sampai 600.000 pasang calon pengantin.

Nah, kemudian kita wajibkan bahwa semua yang akan menikah harus mengikuti bimbingan perkawinan, karena menurut hasil survei kami, bahwa ada korelasi yang sangat signifikan antara angka stunting, angka perceraian dengan angka bimbingan tadi.

Jadi, mereka yang telah mengikuti bimbingan perkawinan itu relatif lebih kokoh keluarganya lebih bisa mengurangi kerentanan keluarganya, sehingga tidak terjadi perceraian atau termasuk juga penanganan stuntingnya.

Jadi, sekali lagi kami menganggap bahwa bimbingan perkawinan ini adalah instrumen yang sangat *powerful* dan sangat strategis untuk mengantisipasi potensi lahirnya anak-anak stunting di Indonesia.

Penyuluh kami libatkan, pesantren-pesantren juga kami terlibat kami juga memberikan bimbingan di situ kami melibatkan bukan hanya penyuluh, penghulu, tapi juga tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan, dai-dai juga

kami, bahkan naskah-naskah khotbah juga kita buat yang terkait dengan stunting.

Tapi sekali lagi, semuanya itu adalah proses di hulu sebenarnya, memberikan literasi kepada keluarga-keluarga di Indonesia untuk memahami tentang persoalan stunting ini.

Saya kira itu di yang kami dapat yang dapat kami sampaikan dari Kementerian Agama. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E):

Terima kasih, Pak Dirjen.

Selanjutnya mungkin kami berikan kesempatan kepada perwakilan dari Dirjen yang mewakili Dirjen Cipta Karya.

Kami persilakan.

DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (PANDU GUNADI ATMOSUKARTO):

Baik, terima kasih, Pimpinan, izin kami menambahkan dan berusaha menjawab apa yang tadi disampaikan. Ini yang terkait dengan PUPR, dari Pak Nurhadi tadi, ya terkait dengan berapa jumlah akses air minum dan sanitasi yang memang belum ya, belum bisa dipenuhi.

Apabila kita melihat dari data memang akses air minum dan sanitasi ini secara nasional memang masih jauh dari targetnya ya dan karena penanganannya ini tidak saja oleh pemerintah pusat, tapi memang penanganannya pemerintah daerah jadi bersama dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota dan juga masyarakat semua juga kita berusaha untuk memenuhi target, ya.

Kalau kita menghitung dari apa yang sudah pernah kita investasikan untuk membantu penyediaan infrastruktur pemukiman untuk air minum dan sanitasi sebagai contoh, kita sudah membangun beberapa sarana prasarana air yang strategis, ya, untuk spam yang regional, ya dan beberapa spam yang melayani metro dan kota besar dan perkotaan.

Dari target yang sudah kita bangun, ini memang masih ada *idle capacity*, nah ini yang sebenarnya eh menjadi targetnya kita untuk kita intervensi. Jadi, catatan kita kalau untuk air minum masih kita perlukan dukungan untuk 3 juta sambungan rumah sebenarnya. Nah, ini yang sedang kita usulkan melalui yang terakhir *invest* air minum dan air limbah untuk tahun 2024 ini.

Sama juga untuk yang sanitasi, ini sebenarnya total yang layak juga masih sangat rendah dan kita juga mengusulkan dengan investasi instalasi pengolahan air limbah atau sanitasi yang sifatnya regional yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat ini ada *idle capacity* juga yang sebenarnya harusnya dilakukan oleh pemerintah daerah tapi belum bisa dilakukan. Ini bisa seharusnya ada potensi *idle capacity* sebanyak 1,1 juta kepala keluarga yang harus kita bangun dan ini masih sangat banyak.

Dan kalau untuk infrastruktur permukiman untuk air minum dan sanitasi ini prinsipnya, kaitannya dengan isu stunting atau isu terkait dengan penanganan kemiskinan ekstrem ini semuanya sangat berkaitan, tapi bisa dibawa ke mana aja.

Makanya, sebenarnya pengalaman kami untuk penanganannya kemiskinan ekstrem, kami bersama dengan Menko PMK dan BKKBN kita mendetailkan data lokasi sampai dengan desa atau kelurahan terkecil.

Sebenarnya, apabila kita mempunyai data sampai dengan tingkat desa atau kelurahan mungkin itu akan bisa memudahkan kami ya, untuk menganalisa kebutuhan sistem infrastruktur air minum atau sanitasi atau air limbah yang diperlukan kebutuhannya akan seperti apa. Mungkin itu,

KETUA RAPAT:

Interupsi, Pak Pandu.

Bicara data tadi, dari desa dan kelurahan, sejauh mana Pak, data yang masuk di Kementerian PUPR karena yang kami turun di lapangan ini, begitu banyak sekali keluarga yang tidak punya yang, MCK aja enggak ada, Pak. MCK umum aja sulit. Seberapa banyak Pak, data yang masuk untuk itu?

DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (PANDU GUNADI ATMOSUKARTO):

Kita, sebenarnya kalau kita berbicara MCK akan sangat banyak. Jadi, kita kemarin pendekatannya dengan jumlah rumah tidak layak huni dulu,

KETUA RAPAT:

Ya.

DIREKTUR SISTEM DAN STRATEGI PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PEMUKIMAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI (PANDU GUNADI ATMOSUKARTO):

Nah, itu yang kita sasar dulu karena banyak sekali anggarannya juga sangat terbatas jadi kita menajamkan sebenarnya sasaran rumah tidak layak huni yang ditangani oleh pemerintah pusat itu yang mana.

Nah, itu kita integrasikan dengan program air minum dan sanitasi jadi rumahnya kita sentuh gitu, kan dengan kalau di Kementerian PUPR ada Ditjen Perumahan, kita menangani dengan BSPS.

Nah, semua yang masuk dengan BSPS lalu kita tangani untuk air minum dan sanitasinya, memang kecepatannya antara BSPS dengan penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasinya memang agak berbeda.

Kalau BSPS kan langsung Bu, Bu Pimpinan, bisa *direct* misalnya dibantu dengan rumah 20 juta per rumah gitu, ya. Tapi kalau penyediaan air minum kita harus agak lebih lama membuat perencanaannya karena harus memikirkan hulu sampai hilir.

Kalau kita hanya membangun SR tapi airnya tidak ada dari hulunya akan percuma juga, hanya ada pipa tapi tidak ada air, gitu kan. Sama juga dengan kita siapkan MCK dengan tangki septiknya, gitu kan.

Tapi, kalau kita tidak siapkan IPLT-nya pengolahan di Pemdanya, maka mungkin dalam waktu 2-3 tahun si tangki septik akan penuh dan ya akan bermasalah juga, gitu.

Nah ini yang makanya pendekatannya kami infrastruktur pemukiman eh agak lebih memerlukan perencanaan dari hulu sampai hilirnya sehingga, konsekuensinya tadi dan kita tidak bisa menyentuh seperti BSPS yang *direct by name by address*.

Karena, sekalinya pipa itu ditarik, jaringan distribusi maka siapapun juga bisa untuk menyambungkan sambungan rumahnya. Nah, ini yang makanya sebenarnya, seandainya kita bisa mendapatkan BNBA-nya itu lebih detail, mungkin kita bisa lebih membuat perencanaan yang lebih tepat.

Seperti contoh, Bu Pimpinan, kami menangani untuk di tahun 2023 dan 2024, kita berdasarkan BNBA yang ada di data P3KE, kami menyiapkan, mengumpulkan data BNBA yang berada di dalam lokasi yang radiusnya berdekatan.

Nah, kalau dia sudah berdekatan, kita akan lebih mudah untuk menyiapkan sistem infrastruktur air minum dan sanitasinya sehingga bisa hampir keseluruhan *by name* dan *by address*-nya yang di rumah tidak layak huni yang ditangani, kita bisa sentuh juga untuk air minum dan sanitasinya. Jadi memang agak lebih kompleks sebetulnya.

Tapi, apapun itu, Bu, setelah kita tangani juga kadang-kadang *habit* atau perilakunya masyarakat juga memang perlu harus diintervensi juga, jadi kadang-kadang itu juga menjadi tantangannya kami ke depan. Mungkin itu, Bu.

KETUA RAPAT:

Begitu, Pak Pandu, jadi mungkin tadi yang disampaikan oleh rekan kami, Pak Yahya, masalah koordinasi ya, Pak, karena di Kementerian, Kementerian Kesehatan juga kami juga ada juga anggaran untuk sanitasi.

Tapi kita tahu bersama khusus Desa juga ada ADD, ini pernah enggak sih, duduk bersama koordinasi siapa lakukan apa, di mana, terfokus gitu siapa lakukan di mana, siapa di mana, terfokus gitu loh, Pak.

Karena ini daerah, kalau tadi, kalau saya lihat tuh dari PUPR ada, dari Kementerian kesehatan, belum lagi lembaga lainnya dari 18 kementerian dan lembaga yang terlibat, ini anggaran cukup banyak sih, Pak, banyak banget tapi ini, stunting, kita kalau kami, karena kami di lapangan terus ya, turun-turun ke lapangan gregetan sendiri, kadang-kadang mau bicara apa adanya, kayak lah kita ini wakil rakyat apa yang kita lakukan gitu loh, Pak. Tapi kalau mau telanjangi pemerintah juga kayak gimana, gitu loh, Pak. Ini, tapi ini kan harus diselesaikan tapi seperti apa.

Nah, sekarang masalah koordinasi tadi loh, Pak. Pernah enggak sih, duduk bersama lakukan apa, ada ADD anggaran juga cukup besar, terus dari Kementerian Sosial juga itu anggarannya juga cukup besar, gitu. Tapi masalah kontinuitasnya ini tidak boleh dibilang tidak terjadi ya, putus-putus, gitu.

Ada yang cuma 3 bulan, selesai, ada 6 bulan terus nanti lagi nanti di tahun politik lagi baru ada lagi. Ini loh, Pak, ini kalau kita seriusi tadi dari Kementerian Agama bicara anggaran enggak ada, ada 50.000, apa untuk apa, Bapak bilang tadi, bagaimana mensosialisasi, ya, penyuluhan-penyuluhan, dari BKKBN lagi. Waduh, banyak sekali, Pak yang dibawa.

Ini pernah enggak sih duduk bersama? kami di lapangan belum pernah ketemu untuk mereka bersama, gitu. Kami, ke lapangan belum pernah ketemu untuk itu, bahkan begitu bicara kemitraan kami di mana itu ya, Pak? Karena, kok, kita turun di wilayah kita kok, enggak ada ya? Dimana boleh enggak disebutkan? Sampai seperti itu kalau kami tanyakan.

Jadi, memang ini Panja ini penting sekali. Kita berharap juga memang hasil dari Panja ini menjadi rekomendasi yang bisa dilakukan di kemudian hari. Jadi, masukkan tentunya bukan sepihak ya dari wakil rakyat juga, kemudian kita minta juga dari Bapak, apa yang sudah dilakukan, terus apa lagi yang perlu, yang harus kami lakukan, karena di sini berbagai fraksi ada lengkap, sembilan fraksi untuk bagaimana agar memang betul-betul tujuan kita untuk menyelesaikan urusan stunting.

Tadi, di sini ada Direktur PAUD tadi disampaikan oleh PAUD kan, bukannya sudah lewat kalau bicara 1000 hari pertama jadi ini memang kayak tumpang tindih baru masalah filosofi dan lain sebagainya, kok kayak agak beda-beda sedikit ya.

Jadi mungkin ini, Pak kita perlu sama-sama masalah koordinasi, sekali lagi masalah koordinasi ini dibutuhkan untuk betul-betul tujuan kita, kita bisa dapatkan. Terima kasih, Pak. Mungkin saya serahkan lagi kepada Ketua Panja.

(PERGANTIAN KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT (Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si):

Terima kasih, Bu ketua. Saya perpanjang dulu karena tadi 15.00 jadi perpanjang mungkin sampai maksimal 15.30, ya Bapak dan Ibu.

Oke, lanjut yang belum menjawab tadi dari Kementerian Sosial, nanti lanjut Kementerian, dari PAUD, ya.

DIREKTUR JAMINAN SOSIAL KELUARGA KEMENTERIAN SOSIAL RI (FAISAL, SST., M.Si):

Baik, terima kasih Ibu pimpinan atas kesempatannya. Kami mencoba untuk menanggapi terkait dengan pertama tadi berkaitan dengan koordinasi.

Kami tentunya dalam pelaksanaan P2K2 seperti yang sudah kami paparkan sebelumnya, tidak bisa bekerja sendiri ataupun tidak sendirian. Kami selalu mengganding teman-teman dari Kementerian Kesehatan, khususnya dalam hal ini dari dinas kesehatan dan juga pihak-pihak lain yang terlibat, khususnya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan untuk ibu hamil yang notabene sebagai komponen penerima bantuan PKH dan juga balita yang juga merupakan penerima bantuan dari PKH ini sendiri.

Nah, oleh karenanya. kami pikir dalam pelaksanaan P2K2 ini khususnya dalam upaya yang preventif kami sudah melakukan fungsi koordinasi dengan baik terkait dengan pelaksanaan di P2K2 ini.

Nah, yang selanjutnya kami coba menanggapi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yahya tadi, terutama terkait dengan pemberian bantuan tunai.

Sebenarnya, kebijakan ini dikarenakan atas beberapa temuan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas penyaluran bantuan khususnya di BPNT, Bantuan Pangan Non Tunai, Bapak. Kebetulan di Direktorat Pemberdayaan, apa, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Namun demikian dari bapak sangat konstruktif yang nantinya kami akan sampaikan dalam rapat pimpinan, khususnya dalam kaitan memastikan bantuan itu memang signifikan atau tidak dalam kaitan penurunan stunting, ya, Pak, ya. Baik.

Nah, yang selanjutnya pertanyaan dari tadi, apa, dari Bu Aliyah. Apakah bantuan yang diberikan itu sudah berimplikasi atas keberhasilan program penurunan stunting khususnya di penerima bantuan PKH ini, kami bisa pastikan bahwa penerima bantuan PKH ini khususnya untuk ibu hamil dan anak balita belum ditemukan yang ada yang stunting dan kami pun tidak bosan-

bosannya melalui kegiatan P2K2 ini melalui pendamping kami yang tersebar di seluruh Indonesia menyampaikan upaya-upaya pencegahan dan juga edukasi yang diberikan dalam kaitan penanganan stunting.

Memang secara khusus, mohon izin Ibu pimpinan, kami memang memiliki anggaran besar berjumlah di PKH ini Rp 28 triliun, hanya saja ini berupa bantuan sosial khususnya untuk 5 komponen di PKH ini adalah komponen ibu hamil, balita, komponen anak sekolah, dan komponen disabilitas dan juga yang disalurkan itu selain daripada tepat guna dan juga tepat sasaran.

Saya pikir itu, Ibu pimpinan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. kami kembalikan.

KETUA RAPAT:

Lanjut Bu, silakan.

**DIREKTUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEMENDIKBUD-RISTEK RI
(KOMALASARI, M.Pd):**

Baik, terima kasih.

Pertama, kami ingin menyampaikan bahwa anak usia dini itu usianya 0 sampai dengan 6 tahun. Jadi, 1000 hari pertama kehidupan itu masuk dalam rentang pendidikan anak usia dini, karena 1000 hari pertama kehidupan itu sejak dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun dan di PAUD sendiri itu ada berbagai layanan, ada TK, ada KB, ada TPA dan ada SPS.

Nah, hanya saja porsi yang dilakukan oleh Direktorat PAUD ini terkait dengan intervensi sensitif. Intervensi sensitif ini memang tidak berhubungan secara langsung dengan penyebab stunting, tetapi berhubungan dengan penyebab tidak langsung.

Dan fokus kami adalah ke satuan-satuan PAUD-nya. Satuan-satuan PAUD yang kami sasar ini diharapkan dapat memberikan layanan pengembangan anak dan holistik integratif, di mana telah kita tetapkan ada 8 indikator, yaitu ada kelas orang tua, ada agar satuan-satuan itu melakukan pemantauan pertumbuhan anak, perkembangan anak, koordinasi dengan unit lain untuk kesehatan dan gizi, kemudian PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat).

Kemudian juga, satuan-satuan PAUD ini dengan dana BOSP itu juga memberikan makanan tambahan dan tentunya pemantauan kepemilikan NIK serta agar satuan-satuan PAUD kita itu bisa memiliki ketersediaan fasilitas sanitasi. Nah, terkait dengan, walaupun ini masuk dalam ranah kami di anak usia dini tentu intervensi ke 1000 HPK ini memang di bawah BKKBN.

Nah, selanjutnya, tadi pertanyaan dari Ibu Demokrat, dari Ibu Aliyah, bagaimana agar kita bisa berfokus untuk memberikan pemahaman terkait dengan nutrisi protein yang tinggi.

Nah di layanan PAUD HI itu ada namanya kelas orang tua, di kelas orang tua ini dapat mengundang ahli gizi, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengedukasi pendidik dan orang tua dalam penyajian menu yang bergizi dan bagaimana mengelola bahan pangan lokal dalam menu makan yang disajikan orang di rumah dan bagaimana menyiapkan menu PMT yang bergizi supaya seimbang. Jadi, sebenarnya ini bisa kita optimalkan di kelas orang tua dan di layanan PMT.

Kemudian, terkait dengan koordinasi, dalam hal ini Direktorat PAUD khususnya Kemendikbudristek juga telah melakukan beberapa koordinasi dengan Kementerian / Lembaga yang terkait seperti misalnya dalam penyusunan regulasi PAUD HI di daerah, kami berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator PMK, kemudian juga dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak PMT, PHBS, itu tentu saja satuan-satuan PAUD kami berkoordinasi dengan Kemenkes, di mana di daerah itu ada Posyandu, ada Puskesmas.

Kemudian, terkait dengan pemenuhan NIK anak di daerah, kami juga berkoordinasi dengan Kemendagri dan Dukcapil dan selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan Bappenas, BKKBN, terkait dengan koordinasi kegiatan-kegiatan yang mendukung percepatan penurunan stunting.

Namun, terima kasih untuk masukan dan catatannya Bapak, terkait dengan perluasan layanan hanya di Direktorat PAUD yang menyentuh ini, tapi tadi juga disampaikan untuk Direktorat SMA atau juga Direktorat Dirjendikti ya Bu, ya, yang juga bisa berkontribusi lebih lanjut.

Demikian, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak dari teman-teman.

Sudah cukup ya, rasanya kami nanti mungkin jika memerlukan data, kita akan berkomunikasi lebih lanjut lagi melalui Setkom, tentu saja karena Panja ini memiliki amanah untuk bisa memberikan rekomendasi yang akan datang seperti apa.

Jadi kalau Panja sebenarnya bernilai positif ya, karena akan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk penanganan stunting di masa yang akan datang.

Baik, Bapak dan Ibu selesai sudah agenda rapat Panja kita, yaitu Panja mengenai Pengawasan terhadap Percepatan Penurunan Stunting. Terima kasih banyak kepada Pak Dirjen dan kepada seluruh Direktur dari empat Kementerian yang hari ini hadir.

Dan sebagaimana di awal, ini adalah saya sampaikan bahwa rapat ini dalam rangka memberi mendapatkan masukan dan juga untuk mendapatkan data-data yang bisa *support* terhadap rekomendasi terkait dengan program ataupun target dari Pak Presiden yaitu Percepatan Penurunan Angka Stunting yang hari ini tadi disampaikan oleh teman-teman penurunannya sangat tidak

signifikan ataupun belum sesuai dengan yang diharapkan. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bisa tercapai sesuai dengan target yang sudah disepakati ataupun ditentukan.

Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada seluruh para undangan yang hadir pada rapat hari ini. Spesial untuk Kementerian Agama Republik Indonesia kami memberikan apresiasi khusus karena Pak Dirjen datang khusus karena memang sebenarnya undangan ini kita tujukan untuk Pak Dirjen, supaya para Dirjen supaya mendengarkan langsung dan data yang kami dapatkan ini dan data-data yang memang bisa representatif untuk dilaporkan di dalam Panja kami.

Dan juga terima kasih kepada seluruh pimpinan, *Masya Allah* ini luar biasa Bu Ketua dan kepemimpinan Pak Charles dan juga Bu Felly yang sudah hadir pada siang sampai sore hari ini.

Begitu juga dengan teman-teman anggota Panja Komisi IX DPR RI yang juga sudah hadir meluangkan waktunya pada rapat Panja hari ini.

Mari kita tutup rapat kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing.
Berdoa dimulai.

(RAPAT: BERDOA)

Selesai.

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* rapat saya tutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.15 WIB)

Selamat sore,
Salam sehat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 09 Juli 2024
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ahmad Rojali, S.Sos
NIP. 196704261988031001